



Strategi Pengembangan *Sport tourism* di Kek Mandalika Dalam Mewujudkan Sinergi Dengan Masyarakat Lokal Desa Kuta, Mertak, Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Abdul Hamid*, Amirosa Ria Setiadji², Lukia Zuraida¹

¹ Program Magister Terapan, Politeknik Pariwisata Bali, Indonesia

² Politeknik Pariwisata Lombok, Indonesia

*Corresponding author email: hamied1107@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 12, 2025

Approved August 08, 2025

Keywords:

Sport tourism, Mandalika SEZ, community empowerment, development strategy, sustainable tourism

ABSTRACT

This study aims to formulate development strategies for sport tourism in the Mandalika Special Economic Zone (SEZ), focusing on synergy with local communities in the villages of Kuta, Mertak, and Sengkol, Pujut District, Central Lombok. Despite Mandalika SEZ's great potential through hosting international events such as MotoGP, the involvement of local communities in sport tourism activities remains limited. A qualitative approach was applied, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis employed SWOT and PESTEL frameworks, supported by triangulation to ensure data validity. The findings indicate that sustainable sport tourism development requires four key strategies: (1) collaboration between event organizers and local communities, (2) capacity building through training and digital promotion systems, (3) the formulation of standard operating procedures (SOPs) for community involvement and partnership regulations, and (4) legal and economic protection for local stakeholders. These strategies are implemented through community asset mapping, needs-based training, the formation of communication forums, and participatory evaluation. This study contributes to the development of a participatory sport tourism model within a special economic zone framework, positioning local communities as active agents of development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan *sport tourism* di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan fokus pada sinergi bersama masyarakat lokal di Desa Kuta, Mertak, dan Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Meskipun KEK Mandalika memiliki potensi besar melalui penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan *sport tourism* masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT dan PESTEL, disertai triangulasi untuk validasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *sport tourism* yang berkelanjutan membutuhkan empat strategi utama: (1) kolaborasi antara penyelenggara event dan komunitas lokal, (2) peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan digitalisasi promosi, (3) penyusunan SOP pelibatan masyarakat serta regulasi kemitraan, dan (4) perlindungan hukum dan ekonomi terhadap pelaku lokal. Strategi ini diimplementasikan melalui pendataan potensi desa, pelatihan berbasis kebutuhan, pembentukan forum komunikasi, serta evaluasi partisipatif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model *sport tourism* partisipatif berbasis kawasan ekonomi khusus yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan.



How to cite: Example: Hamid, A., Satiadji, A. R., & Zuraida, L. (2025). Strategi Pengembangan Sport tourism di Kek Mandalika Dalam Mewujudkan Sinergi Dengan Masyarakat Lokal Desa Kuta, Mertak, Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1459–1473. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4030>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional Indonesia (Gunawan et al., 2024). Tidak hanya sebagai sumber devisa, pariwisata juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkenalkan budaya lokal ke dunia internasional (Wahyudi, 2017). Seiring dengan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan kawasan, pemerintah telah menetapkan beberapa destinasi super prioritas, salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini dikembangkan sebagai pusat *sport tourism* dengan hadirnya Pertamina Mandalika International Circuit yang menjadi tuan rumah berbagai ajang balap internasional seperti MotoGP dan *World Superbike* (WSBK) (Chandra et al., 2023)

Sport tourism merupakan bentuk pariwisata yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan perjalanan wisata. Menurut Gibson (1998), *sport tourism* mencakup perjalanan untuk menonton, berpartisipasi, atau terlibat dalam *event* olahraga. Di Indonesia, konsep ini mulai berkembang pesat, terutama setelah adanya penyelenggaraan *event* internasional yang mampu menarik ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun demikian, dalam konteks KEK Mandalika, pelibatan masyarakat lokal—khususnya di desa-desa sekitar seperti Kuta, Mertak, dan Sengkol—belum berjalan optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain kurangnya akses informasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya pelibatan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan wisata olahraga.

Sebagai kawasan strategis nasional, KEK Mandalika dirancang tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mendorong pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi. Komunitas lokal sering kali hanya menjadi penonton dalam pembangunan, atau sekadar dimanfaatkan dalam pekerjaan informal saat *event* berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada penolakan, seperti yang terjadi menjelang ajang WSBK 2021, ketika kelompok pemuda lokal melakukan aksi protes karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan persiapan *event* (Chandra et al., 2023).

Analisis terhadap permasalahan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan *sport tourism* harus didasarkan pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan (Anjaningrum & Sidi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengintegrasikan faktor internal dan eksternal secara komprehensif. Dalam konteks ini, analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*) menjadi alat yang relevan untuk merumuskan strategi pengembangan yang responsif terhadap kondisi lokal (Joyosuharto, 2021)

Lebih lanjut, pelibatan masyarakat lokal dalam *sport tourism* bukan sekadar soal pekerjaan atau keuntungan ekonomi, tetapi menyangkut aspek pemberdayaan. Masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan objek semata (Wiarti & Putra, 2021). Hal ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif, akses informasi, dan penguatan kapasitas individu

maupun kelembagaan lokal (Suharto, 2020).

Fokus penelitian ini dibatasi pada tiga desa utama yang memiliki interaksi paling intensif dengan kegiatan *sport tourism* di Mandalika. Ketiganya dipilih karena secara geografis berdekatan langsung dengan sirkuit dan secara sosial ekonomi paling terdampak oleh aktivitas pariwisata. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam penyusunan strategi pengembangan *sport tourism* berbasis partisipatif di kawasan KEK, dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah, penyelenggara *event*, dan masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana strategi pengembangan *sport tourism* di KEK Mandalika dapat mewujudkan sinergi yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat lokal? Jawaban atas pertanyaan ini penting tidak hanya untuk konteks Mandalika, tetapi juga dapat menjadi model pengembangan destinasi pariwisata lainnya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi pengembangan *sport tourism* di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta bentuk sinerginya dengan masyarakat lokal di sekitarnya. Lokasi penelitian difokuskan pada tiga desa yang berbatasan langsung dengan Sirkuit Mandalika, yaitu Desa Kuta, Desa Mertak, dan Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena ketiga desa tersebut memiliki intensitas keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas pariwisata olahraga, baik secara sosial maupun ekonomi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, meliputi perwakilan masyarakat, aparat desa, pelaku usaha lokal, pengelola kawasan (MGPA dan ITDC), serta perwakilan pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif untuk merekam aktivitas dan keterlibatan masyarakat selama penyelenggaraan *event sport tourism*, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan laporan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada integrasi dua kerangka utama, yaitu SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*), untuk merumuskan strategi yang responsif terhadap kondisi internal dan eksternal kawasan (Rangkuti, 2018). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber (Sugiyono, 2019). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan strategi pengembangan *sport tourism* yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam konteks kawasan ekonomi khusus di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Analisis PESTEL

Analisis PESTEL dilakukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang memengaruhi strategi pengembangan *sport tourism* di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pendekatan ini mencakup enam dimensi utama: politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Setiap aspek dianalisis berdasarkan data lapangan, observasi, dan wawancara dengan informan kunci, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sinergi antara *sport tourism* dan masyarakat lokal. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang adaptif terhadap dinamika eksternal kawasan. Adapun hasil ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Politik (*Political*)

- a. Dukungan kuat dari pemerintah pusat dalam pengembangan KEK Mandalika sebagai destinasi super prioritas.

Pemerintah pusat menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangan KEK Mandalika dengan menetapkannya sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengalokasian anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur, promosi berskala global, serta kehadiran langsung Presiden dalam peresmian proyek strategis seperti Sirkuit Mandalika. Hal ini menjadi sinyal positif bagi investor dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi *sport tourism* secara lebih serius dan terintegrasi.

- b. Adanya kebijakan afirmatif dalam bentuk regulasi KEK, namun masih minim regulasi yang spesifik mengatur pelibatan masyarakat lokal.

Kebijakan afirmatif berupa penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan investasi, termasuk pembebasan pajak dan percepatan perizinan. Namun, hingga saat ini, belum tersedia regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur tata cara pelibatan masyarakat lokal dalam aktivitas *sport tourism*, baik dalam bentuk SOP, kewajiban kemitraan, maupun skema perlindungan sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pembangunan fisik dengan pemberdayaan sosial.

- c. Stabilitas politik nasional dan daerah relatif kondusif untuk kelangsungan investasi *sport tourism*.

Secara umum, stabilitas politik di tingkat nasional dan daerah mendukung kelancaran investasi di sektor pariwisata, termasuk *sport tourism* di Mandalika. Pemerintah daerah Lombok Tengah juga menunjukkan sinergi yang baik dengan pemerintah pusat dan BUMN pengelola kawasan. Tidak adanya konflik politik signifikan di wilayah ini memberikan jaminan keamanan bagi investor dan penyelenggara *event* internasional. Kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga kontinuitas kegiatan *sport tourism* yang memerlukan perencanaan jangka panjang.

2. Ekonomi (*Economic*)

- a. *Sport tourism* melalui ajang MotoGP dan WSBK memberikan multiplier effect terhadap sektor informal seperti UMKM dan transportasi lokal.

Penyelenggaraan *event* internasional seperti MotoGP dan WSBK di Sirkuit Mandalika telah menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal, khususnya di sektor informal. UMKM yang bergerak di bidang kuliner, suvenir, penginapan, dan transportasi merasakan lonjakan permintaan selama *event* berlangsung. Aktivitas ekonomi masyarakat meningkat signifikan karena hadirnya ribuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang membutuhkan berbagai layanan pendukung selama *event*.

- b. Ketergantungan terhadap *event* berskala internasional membuat ekonomi lokal bersifat musiman.

Meskipun memberikan dampak ekonomi yang besar, perekonomian lokal di sekitar Mandalika cenderung bergantung pada momen penyelenggaraan *event* besar. Ketika tidak ada *event* berlangsung, aktivitas UMKM dan pendapatan masyarakat mengalami penurunan drastis. Ketergantungan terhadap *event* ini menciptakan pola ekonomi musiman yang tidak stabil, sehingga menghambat keberlanjutan usaha

masyarakat dalam jangka panjang.

- c. Belum ada skema investasi khusus untuk pengembangan usaha mikro lokal secara berkelanjutan.

Sampai saat ini, belum tersedia skema investasi atau pendampingan usaha yang dirancang khusus untuk mendorong penguatan kapasitas UMKM lokal secara berkelanjutan. Ketiadaan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta jaringan pemasaran yang stabil menyebabkan usaha mikro sulit berkembang meskipun berada di kawasan dengan potensi ekonomi tinggi. Tanpa kebijakan afirmatif, masyarakat lokal akan tetap menjadi penonton dalam pertumbuhan industri *sport tourism*.

3. Sosial (*Social*)

- a. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan *sport tourism*, namun partisipasi aktif masih rendah.

Masyarakat lokal menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kehadiran *event-event sport tourism* di Mandalika, seperti MotoGP dan WSBK, yang dianggap membawa prestise dan peluang ekonomi. Namun demikian, antusiasme ini belum dibarengi dengan partisipasi aktif dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Minimnya pelibatan masyarakat secara langsung mengindikasikan adanya kesenjangan antara keinginan untuk terlibat dengan kenyataan di lapangan yang masih eksklusif bagi pihak tertentu.

- b. Terdapat kesenjangan sosial akibat keterbatasan akses dan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi.

Kesempatan ekonomi yang muncul dari *sport tourism* belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki jaringan, modal, dan keterampilan lebih unggul dalam mengakses peluang, sementara masyarakat lain—terutama dari kalangan ekonomi lemah—masih terpinggirkan. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan antarwarga desa sekitar kawasan KEK Mandalika.

- c. Minimnya forum dialog antara penyelenggara *event* dan masyarakat menyebabkan munculnya potensi konflik sosial.

Kurangnya ruang komunikasi yang formal dan rutin antara penyelenggara *event*, pengelola kawasan, dan masyarakat lokal menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang. Ketidakterbukaan informasi dan keputusan yang bersifat sepihak memicu ketidakpuasan masyarakat. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan menimbulkan aksi protes yang dapat mencoreng citra pariwisata Mandalika dan mengganggu stabilitas sosial di sekitar kawasan.

4. Teknologi (*Technological*)

- a. Infrastruktur teknologi digital di kawasan Mandalika terus berkembang (Wi-Fi publik, *platform* promosi daring).

Pengembangan infrastruktur teknologi digital di kawasan Mandalika mengalami kemajuan pesat, ditandai dengan tersedianya jaringan Wi-Fi publik dan penggunaan *platform* digital untuk promosi destinasi dan *event* internasional. Pemerintah dan pengelola kawasan juga mulai memanfaatkan media sosial dan aplikasi digital untuk menjangkau wisatawan. Hal ini menunjukkan komitmen dalam mendukung transformasi digital sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata modern.

- b. Masyarakat lokal sebagian besar belum melek digital, sehingga belum mampu mengoptimalkan media sosial dan *platform* daring untuk promosi produk lokal.

Meskipun infrastruktur digital telah tersedia, sebagian besar masyarakat lokal belum memiliki kemampuan dan literasi digital yang memadai. Akibatnya, mereka belum mampu menggunakan media sosial, marketplace, atau platform promosi daring secara optimal untuk memperkenalkan produk dan jasa lokal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital yang menghambat pelibatan aktif masyarakat dalam ekosistem *sport tourism* berbasis teknologi.

- c. Belum tersedia sistem informasi terpadu untuk koordinasi antara *stakeholders*

Sampai saat ini, belum ada sistem informasi yang mengintegrasikan komunikasi dan koordinasi antara pihak pengelola kawasan (seperti ITDC dan MGPA), pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Ketidadaan sistem ini menyebabkan informasi terkait pelatihan, peluang usaha, atau pelibatan dalam *event* tidak tersampaikan secara merata dan cepat. Akibatnya, proses kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat berjalan lambat dan tidak terkoordinasi secara efektif.

5. Lingkungan (*Environmental*)

- a. KEK Mandalika terletak di wilayah dengan ekosistem pesisir yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Kawasan Mandalika memiliki karakteristik lingkungan pesisir dengan ekosistem yang sensitif, seperti terumbu karang, mangrove, dan habitat biota laut. Pengembangan infrastruktur besar-besaran dan peningkatan kunjungan wisatawan berisiko merusak keseimbangan ekologi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis konservasi menjadi hal penting dalam perencanaan kawasan.

- b. Kegiatan *sport tourism* berisiko meningkatkan polusi suara dan sampah, terutama saat *event* besar.

Event berskala internasional seperti MotoGP dan WSBK berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, termasuk polusi suara dari kendaraan bermotor dan peningkatan volume sampah dari penonton maupun pelaku usaha. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas destinasi wisata, serta menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.

- c. Belum ada sistem pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat.

Sampai saat ini, belum tersedia sistem pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam pengawasan, edukasi, maupun pengelolaan limbah selama dan setelah *event* berlangsung. Ketidakhadiran mekanisme partisipatif ini menyebabkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan masih rendah, sehingga potensi kerusakan lingkungan cenderung terus meningkat tanpa mitigasi yang efektif.

6. Hukum (*Legal*)

- a. Landasan hukum pengembangan KEK sudah kuat (PP No. 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika), namun implementasi pengaturan kerja sama dengan masyarakat masih lemah.

Pengembangan KEK Mandalika memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 yang menetapkan status kawasan dan berbagai insentif investasi. Meskipun regulasi ini mendukung pengembangan fisik dan ekonomi, aspek implementatif mengenai mekanisme kerja sama antara pengelola kawasan dan masyarakat lokal belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan cenderung bersifat simbolis dan tidak

terlembaga.

- b. Belum terdapat peraturan operasional mengenai *standard operating procedure* (SOP) pelibatan masyarakat lokal dalam *event sport tourism*.

Hingga kini, belum ada pedoman teknis atau peraturan operasional yang mengatur secara rinci bagaimana masyarakat lokal dapat dilibatkan secara sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi *event sport tourism*. Ketiadaan SOP ini menyebabkan proses pelibatan cenderung ad hoc dan tidak memiliki mekanisme kontrol yang jelas, sehingga peluang masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dan transparan menjadi terbatas.

- c. Terdapat sengketa lahan yang belum sepenuhnya selesai dan berpotensi mengganggu keberlanjutan *event*.

Beberapa kasus sengketa lahan antara warga lokal dengan pihak pengembang masih belum terselesaikan secara tuntas. Sengketa ini berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah dan kompensasi yang dianggap tidak adil oleh sebagian warga. Ketidakpastian status lahan ini tidak hanya mengganggu hubungan sosial di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi hambatan hukum yang mengancam keberlangsungan *event sport tourism* di masa mendatang apabila tidak segera diselesaikan secara transparan dan akomodatif.

Hasil Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan *sport tourism* di KEK Mandalika, khususnya dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat lokal di desa-desa sekitar kawasan. Analisis ini mencakup empat komponen utama: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Hasil analisis SWOT menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang tepat dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan yang dijelaskan pada bagian berikut.

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. KEK Mandalika memiliki infrastruktur bertaraf internasional seperti Pertamina Mandalika *International Circuit*.

Kehadiran sirkuit balap bertaraf internasional menjadi daya tarik utama yang menempatkan Mandalika di peta *sport tourism* dunia. Infrastruktur ini menjadi magnet bagi penyelenggaraan *event* global seperti MotoGP dan WSBK yang mendatangkan wisatawan, media internasional, serta investor dari berbagai negara.

- b. Pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan kawasan.

Komitmen ini tampak melalui pengucuran anggaran, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga keterlibatan aktif dalam promosi Mandalika sebagai destinasi super prioritas. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN menjadi modal kelembagaan yang strategis untuk mendukung pertumbuhan *sport tourism*.

- c. Daya tarik alam dan budaya lokal yang khas mendukung konsep *sport tourism* berbasis kearifan lokal.

Keindahan alam pesisir dan nilai-nilai budaya masyarakat Sasak menjadi pelengkap yang memperkaya pengalaman wisata. Potensi ini memungkinkan pengembangan paket wisata yang memadukan *event* olahraga dengan atraksi budaya, ekowisata, dan kuliner lokal.

- d. Antusiasme masyarakat terhadap *event sport tourism* cukup tinggi.

Masyarakat lokal menunjukkan dukungan moral dan keterlibatan emosional terhadap ajang-ajang internasional yang diselenggarakan di Mandalika. Hal ini menjadi modal sosial yang penting untuk membangun kemitraan antara warga dan penyelenggara kegiatan pariwisata.

- e. Adanya kelembagaan pengelola seperti ITDC dan MGPA yang memiliki kapasitas menarik investasi.

Lembaga-lembaga ini telah terbukti mampu membangun koneksi internasional dan mengelola kawasan secara profesional. Keberadaan mereka memberikan keyakinan kepada investor bahwa Mandalika dikelola secara serius dan berstandar global.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan *event* masih rendah.

Meskipun memiliki antusiasme tinggi, masyarakat lokal sering hanya dilibatkan pada tataran pelaksana teknis tanpa keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme partisipatif yang berujung pada ketimpangan akses manfaat ekonomi.

- b. Literasi digital masyarakat lokal masih terbatas.

Kurangnya keterampilan digital menghambat masyarakat dalam memanfaatkan peluang promosi dan pemasaran berbasis teknologi. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha lokal tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar yang lebih melek digital.

- c. Belum tersedia SOP atau regulasi teknis pelibatan masyarakat lokal dalam *event sport tourism*.

Ketiadaan pedoman formal menyebabkan pelibatan masyarakat cenderung sporadis dan tidak merata. Tanpa acuan yang jelas, peluang kolaborasi yang adil dan transparan menjadi sulit diwujudkan.

- d. Ekonomi lokal bergantung pada *event* besar dan bersifat musiman.

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat terpengaruh oleh keberlangsungan *event* berskala internasional. Ketika tidak ada *event*, terjadi penurunan penghasilan yang signifikan, yang mencerminkan belum terbentuknya ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

- e. Forum komunikasi antara pengelola kawasan dan masyarakat masih minim.

Kurangnya ruang dialog formal menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata dan aspirasi masyarakat seringkali tidak terdengar. Hal ini menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Pasar *sport tourism* global dan domestik terus berkembang.

Tren wisata olahraga semakin digemari oleh wisatawan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Mandalika memiliki posisi strategis untuk menangkap ceruk pasar ini dan memperluas jangkauan wisatawan mancanegara.

- b. Dukungan investasi dari pemerintah dan swasta membuka ruang penguatan ekonomi lokal.

Masuknya berbagai investor ke kawasan Mandalika membuka peluang kemitraan dengan masyarakat dalam bentuk waralaba, kemitraan usaha, atau pengembangan produk dan jasa lokal.

- c. Perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk promosi dan pemberdayaan.

Media sosial, e-commerce, dan aplikasi pariwisata dapat menjadi sarana untuk

- memperkenalkan produk lokal serta memperluas jaringan pasar UMKM masyarakat sekitar kawasan.
- d. Citra Mandalika sebagai tuan rumah *event* internasional mendongkrak nilai jual destinasi. Merek "Mandalika" yang semakin dikenal luas dapat dimanfaatkan untuk menciptakan produk turunan seperti brand lokal, paket wisata tematik, atau festival budaya tahunan.
 - e. Program pemberdayaan dari kementerian dan lembaga dapat disinergikan. Berbagai program dari Kemendikbud, Kemendes PDTT, dan Kementerian Koperasi dapat disesuaikan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan dan peluang *sport tourism*.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Timbulnya ketimpangan sosial akibat pelibatan masyarakat yang tidak merata. Jika pengelolaan *event* tidak inklusif, maka hanya kelompok tertentu yang mendapat manfaat. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan ketidakpuasan sosial.
- b. Sengketa lahan yang belum tuntas dapat menghambat stabilitas kawasan. Beberapa warga masih mengklaim hak atas lahan di sekitar kawasan KEK, yang dapat memicu konflik hukum atau aksi protes yang mencoreng citra destinasi.
- c. Dampak lingkungan dari *event* berskala besar belum tertangani secara sistematis. Tingginya volume sampah, kebisingan, dan gangguan ekosistem akibat *event* besar berpotensi merusak daya dukung lingkungan jika tidak diantisipasi dengan sistem pengelolaan yang baik.
- d. Ketergantungan pada *event* internasional tanpa diversifikasi produk wisata menimbulkan risiko. Jika *event* besar dibatalkan atau tidak berkelanjutan, maka aktivitas pariwisata akan stagnan. Diversifikasi produk wisata menjadi penting untuk menjaga kesinambungan kunjungan.
- e. Persaingan dengan pelaku usaha luar daerah dapat meminggirkan masyarakat lokal. Pelaku usaha dari luar yang lebih siap dari segi modal dan teknologi cenderung mendominasi pasar, sementara masyarakat lokal belum cukup kompetitif. Hal ini mengancam upaya pemberdayaan ekonomi lokal.

Diskusi

Strategi Pengembangan dan Model Pelibatan Masyarakat dalam *Sport tourism* Mandalika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *sport tourism* yang berkelanjutan di KEK Mandalika membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan infrastruktur dan promosi destinasi, tetapi juga menjamin keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam keseluruhan proses pengembangan. Peneliti merumuskan empat strategi utama:

1. Kolaborasi antara Penyelenggara *Event* dan Komunitas Lokal

Kolaborasi yang terstruktur dan terlembaga antara penyelenggara *event sport tourism* (seperti MGPA dan mitra swasta) dengan komunitas lokal merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif (Santoso et al., 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, selama ini hubungan yang terjalin bersifat satu arah dan berbasis kebutuhan jangka pendek dari penyelenggara *event*, bukan berbasis rencana jangka panjang atau kemitraan yang setara.

Menurut peneliti, pendekatan kolaboratif yang ideal adalah model *co-creation* dan *co-*

management, di mana masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga dilibatkan dalam desain program, perencanaan logistik, hingga distribusi manfaat (Jiang et al., 2025). Kolaborasi juga perlu didukung dengan mekanisme koordinasi lintas lembaga (desa–BUMDes–MGPA–ITDC–Pemda), serta forum musyawarah rutin untuk menyepakati agenda pelibatan, tanggung jawab, dan skema kemitraan.

Penelitian oleh Anjaningrum dan Sidi (2022) menekankan bahwa kolaborasi antara komunitas dan pengelola *event* menjadi penentu keberhasilan *sport tourism* berbasis masyarakat. Tanpa mekanisme kolaboratif yang berkeadilan, *event* hanya akan menjadi ruang akumulasi modal investor, sementara masyarakat lokal tetap dalam posisi marginal.

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Pelatihan dan Digitalisasi Promosi

Strategi kedua berfokus pada transformasi kualitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri *sport tourism*. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, banyak pelaku usaha lokal belum memahami standar layanan *hospitality*, teknik promosi daring, maupun manajemen keuangan sederhana. Literasi digital menjadi kebutuhan mendesak di era *sport tourism* yang kini sangat bergantung pada promosi media sosial, reservasi daring, dan pengelolaan reputasi digital. Oleh karena itu, pelatihan harus mencakup penggunaan platform digital (*marketplace*, *e-payment*, media sosial), manajemen UMKM, dan *customer service*.

Selain itu, penguatan kapasitas tidak hanya diberikan kepada individu, tetapi juga kelembagaan lokal seperti BUMDes, koperasi desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan komunitas pemuda. Program pelatihan ini dapat dikolaborasikan dengan mitra CSR, akademisi, serta instansi teknis seperti Dinas Pariwisata dan BLK. Sejalan dengan Joyosuharto (2021), pelatihan berbasis kebutuhan (*need-based training*) adalah bentuk intervensi paling efektif dalam memperkuat ketahanan masyarakat di tengah tekanan industri pariwisata yang sangat dinamis.

3. Penyusunan SOP Pelibatan Masyarakat serta Regulasi Kemitraan

Salah satu temuan kunci dalam penelitian ini adalah ketiadaan peraturan operasional (SOP) dan regulasi kemitraan yang mengatur secara rinci pelibatan masyarakat lokal dalam *event sport tourism*. Hingga saat ini, pelibatan warga bersifat informal dan bergantung pada keputusan sepihak dari pihak pengelola atau kontraktor. Ketiadaan SOP menyebabkan ketidakpastian peran, lemahnya perlindungan kerja, dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial atas pelibatan tenaga lokal (Sulistiowati et al., 2021). Oleh karena itu, peneliti menyarankan penyusunan SOP yang menjelaskan standar keterlibatan masyarakat—misalnya skema perekrutan tenaga kerja lokal, kuota vendor UMKM desa, skema pembagian pendapatan, dan prosedur pengaduan masyarakat.

SOP ini harus ditetapkan melalui musyawarah antara masyarakat, pemerintah desa, pengelola KEK (ITDC), dan penyelenggara *event* (MGPA), kemudian dilegalisasi dalam bentuk perdes, MoU, atau surat keputusan bersama. Regulasi ini akan menjadi acuan legal untuk mendorong kolaborasi yang adil dan memperkecil celah konflik sosial akibat ketimpangan akses. Menurut Suharto (2020), keberhasilan pembangunan partisipatif sangat bergantung pada kejelasan tata kelola dan pengaturan hubungan kuasa antaraktor, yang hanya bisa ditegakkan jika ada perangkat regulatif yang melindungi kepentingan komunitas lokal.

4. Perlindungan Hukum dan Ekonomi terhadap Pelaku Lokal

Strategi keempat adalah perlindungan terhadap pelaku lokal, baik dari sisi hukum maupun dari sisi ekonomi. Secara hukum, masyarakat lokal rentan terhadap praktik eksklusif, baik dalam pengambilan keputusan maupun distribusi manfaat (Ira & Muhamad, 2020).

Misalnya, sengketa lahan yang belum tuntas dan tidak adanya kontrak kerja tertulis saat *event* berlangsung, menjadi potensi pelanggaran hak masyarakat adat dan pekerja informal. Perlindungan hukum dapat dimulai dengan legalisasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan penyelenggara *event*, pemberlakuan kontrak kerja standar bagi tenaga kerja lokal, serta pembentukan lembaga pengaduan masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap legalitas usaha, akses permodalan, dan jaminan perlindungan UMKM lokal dari dominasi usaha luar juga harus menjadi perhatian.

Perlindungan ekonomi dapat diwujudkan melalui afirmasi dalam bentuk kuota penyedia lokal, subsidi logistik, program kurasi produk lokal untuk kebutuhan *event*, serta insentif bagi vendor yang memprioritaskan kolaborasi dengan warga desa. Model ini akan membangun ekosistem ekonomi yang resilien, mandiri, dan berkeadilan di sekitar kawasan KEK. Sebagaimana disebutkan dalam analisis PESTEL, aspek hukum dan ekonomi merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberlanjutan partisipasi masyarakat. Tanpa perlindungan yang memadai, maka masyarakat akan selalu berada dalam posisi subordinat yang hanya bergantung pada kebijakan sepihak dari pihak pengelola (Najib & Surono, 2022).

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan PESTEL, strategi yang paling dominan dan relevan adalah strategi WO (*Weaknesses–Opportunities*), yaitu upaya mengatasi kelemahan internal masyarakat lokal dengan memanfaatkan peluang eksternal dari sektor *sport tourism*. Sebagaimana teridentifikasi dalam analisis SWOT, kelemahan utama berupa rendahnya literasi digital, minimnya keterlibatan dalam perencanaan, dan ketergantungan terhadap *event* musiman. Di sisi lain, peluang dari dukungan investasi, pengembangan teknologi digital, serta meningkatnya tren wisata olahraga global memberikan ruang intervensi strategis yang besar. Menurut peneliti, berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara, pelibatan masyarakat hingga saat ini cenderung bersifat simbolis. Masyarakat lebih sering terlibat sebagai tenaga kerja *event* dadakan, bukan sebagai mitra yang memiliki kapasitas dan posisi tawar dalam rantai nilai pariwisata.

Permasalahan ini diperkuat dengan temuan bahwa belum tersedia regulasi teknis seperti SOP pelibatan masyarakat yang mengatur secara detail tata kelola kemitraan antara pengelola kawasan dan komunitas lokal. Padahal, PP No. 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, hanya saja belum diikuti oleh regulasi turunannya yang berorientasi pada keadilan sosial dan pelibatan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merancang model implementasi strategi pengembangan *sport tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Model ini mencakup empat tahapan implementasi utama:

1. Pendataan Potensi Desa

Pendataan potensi desa merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam membangun fondasi strategi pengembangan *sport tourism* yang partisipatif dan kontekstual. Langkah ini dilakukan untuk memetakan secara menyeluruh sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa terdampak (Kuta, Mertak, dan Sengkol), meliputi sumber daya manusia (SDM), produk unggulan lokal, jasa pendukung, serta kelembagaan sosial dan adat. Data ini diperlukan untuk memahami kapasitas riil masyarakat dalam mendukung dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan *event sport tourism* seperti MotoGP dan WSBK.

Menurut peneliti, berdasarkan observasi dan wawancara dengan perangkat desa, sebagian besar desa belum memiliki data terintegrasi mengenai pelaku UMKM, keterampilan warga, dan aset sosial budaya yang bisa dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas pariwisata olahraga. Padahal, data ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan jenis

pelatihan yang dibutuhkan, model kemitraan yang sesuai, hingga penempatan tenaga kerja lokal dalam struktur *event*. Dalam konteks ini, pendataan juga harus mencakup pemetaan nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan kelembagaan adat seperti tokoh pemuda, kelompok perempuan, hingga lembaga adat yang berpotensi menjadi mitra kolaboratif.

2. Pelatihan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Setelah pemetaan potensi dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun program pelatihan berbasis kebutuhan (*demand-driven training*). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, pelatihan yang dibutuhkan masyarakat di kawasan Mandalika meliputi empat bidang utama: literasi digital, manajemen UMKM, layanan hospitality, dan promosi daring.

Literasi digital menjadi sangat penting karena sebagian besar pelaku UMKM dan warga belum terbiasa menggunakan teknologi informasi sebagai alat promosi dan transaksi. Padahal, dengan meningkatnya peran media sosial dan platform digital dalam pemasaran pariwisata, kemampuan mengelola konten, mengakses marketplace, dan menggunakan sistem pembayaran digital menjadi keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha lokal.

Selain itu, pelatihan manajemen UMKM dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha dalam hal pencatatan keuangan, perencanaan usaha, pengemasan produk, hingga pengelolaan izin dan legalitas usaha. Untuk bidang hospitality, pelatihan berfokus pada layanan tamu, standar kebersihan, pelayanan warung/makanan, pengelolaan homestay, dan keterampilan komunikasi pariwisata. Semua pelatihan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga bukan sekadar formalitas proyek, tetapi menghasilkan transformasi kemampuan masyarakat.

Peneliti juga menemukan bahwa beberapa program pelatihan yang telah dilakukan cenderung tidak berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Oleh karena itu, pelatihan berbasis kebutuhan ini harus bersifat tematik, aplikatif, dan melibatkan pelatih dari lembaga profesional seperti BLK, dinas pariwisata, akademisi, maupun pelaku usaha sukses dari komunitas lokal.

3. Pembentukan Forum Komunikasi Komunitas–Pengelola

Langkah ketiga adalah membentuk forum komunikasi resmi antara masyarakat, pengelola KEK (seperti ITDC dan MGPA), pemerintah desa, dan penyelenggara *event*. Forum ini berfungsi sebagai wadah dialog, penyampaian aspirasi, distribusi informasi, serta ruang negosiasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat lokal. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu akar persoalan ketimpangan partisipasi masyarakat dalam *event sport tourism* adalah tidak adanya mekanisme komunikasi yang sistematis dan reguler. Forum komunikasi ini harus memiliki struktur yang inklusif, melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Pertemuan forum dapat dilakukan secara berkala sebelum dan sesudah *event*, guna membahas alur pelibatan masyarakat, distribusi pekerjaan, standar harga jasa/produk lokal, serta mitigasi dampak sosial dan lingkungan.

4. Evaluasi Partisipatif

Tahapan terakhir dari implementasi strategi ini adalah evaluasi partisipatif. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelibatan masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif, serta menilai dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga (Sapkota et al., 2024). Evaluasi ini harus dilakukan secara inklusif dan melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola kawasan agar dapat merefleksikan dinamika pelaksanaan strategi di lapangan (Pramono et al., 2019). Evaluasi partisipatif dapat mencakup

indikator seperti: jumlah warga yang terlibat langsung dalam *event*, peningkatan pendapatan UMKM, kepuasan masyarakat terhadap sistem pelibatan, peningkatan literasi digital, dan penurunan konflik sosial. Evaluasi juga penting untuk mengetahui hambatan dan merumuskan rekomendasi perbaikan strategi secara berkelanjutan (Fikri Rizal et al., 2024).

Berdasarkan pengamatan peneliti, saat ini belum ada mekanisme formal evaluasi sosial yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan KEK Mandalika. Evaluasi yang dilakukan lebih bersifat administratif dan fokus pada output fisik. Padahal, keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tumbuhnya kepemilikan sosial (*social ownership*) terhadap proses pembangunan.

Langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan respons terhadap hasil analisis PESTEL, khususnya pada aspek teknologi (digitalisasi yang belum merata), ekonomi (ketimpangan distribusi manfaat), dan hukum (kekosongan regulasi teknis pelibatan masyarakat). Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki kontribusi nyata dan kontrol atas arah pengembangan kawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto (2020) bahwa pemberdayaan yang sejati terjadi ketika masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan.

Model pelibatan partisipatif yang dikembangkan dalam penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Anjaningrum dan Sidi (2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas sangat ditentukan oleh eksistensi forum desa–pengelola dan pelatihan terpadu berbasis teknologi. Dari sisi kelembagaan, keberadaan ITDC dan MGPA sebagai pengelola kawasan Mandalika memiliki potensi besar untuk menginisiasi kebijakan afirmatif, antara lain melalui sistem kuota vendor lokal, prioritas perekrutan tenaga kerja desa, serta penyusunan perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, strategi WO yang dirancang dalam penelitian ini bukan hanya upaya pelatihan teknis, tetapi juga merupakan rekayasa kelembagaan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Jika strategi ini diimplementasikan secara konsisten, maka KEK Mandalika berpotensi menjadi model nasional dalam pengembangan *sport tourism* partisipatif yang mengutamakan kesetaraan, keberlanjutan, dan keadilan sosial dalam kerangka pembangunan kawasan ekonomi khusus.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan *sport tourism* di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, potensi tersebut belum diiringi dengan pelibatan yang optimal dari komunitas di sekitar kawasan, terutama Desa Kuta, Mertak, dan Sengkol. Melalui analisis SWOT dan PESTEL, ditemukan bahwa strategi yang paling relevan untuk diterapkan adalah strategi WO (*Weaknesses–Opportunities*), yakni upaya mengatasi kelemahan internal masyarakat dengan memanfaatkan peluang eksternal dari pengembangan *sport tourism*. Empat strategi utama yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah: (1) membangun kolaborasi yang terstruktur antara penyelenggara *event* dan komunitas lokal; (2) meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan berbasis kebutuhan, terutama literasi digital, manajemen UMKM, dan promosi daring; (3) menyusun SOP pelibatan masyarakat dan regulasi kemitraan yang mengikat; serta (4) memberikan perlindungan hukum dan ekonomi terhadap pelaku lokal melalui sistem kontrak kerja, afirmasi ekonomi, dan jaminan perlindungan UMKM. Model implementasi strategi partisipatif ini dirancang melalui empat tahap utama: pendataan potensi desa, pelatihan berbasis kebutuhan, pembentukan forum komunikasi desa–pengelola, dan evaluasi partisipatif.

Strategi ini tidak hanya menjawab masalah teknis pelibatan masyarakat, tetapi juga menjadi upaya sistematis dalam membangun ekosistem *sport tourism* yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjaningrum, S. R., & Sidi, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sport Tourism: Studi Kasus Kawasan Pariwisata Khusus. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.xxxx/jpd.v10i1.xxx>
- Chandra, C. A., Kusuma, T. I. J., & Wijaya, S. (2023). Sport tourism quality and its influence on visitor satisfaction and revisit intention: an empirical study of Mandalika MotoGP. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 8(2), 186–194. <https://doi.org/10.26905/jpp.v8i2.10366>
- Fikri Rizal, M., Nurhasanah, L., & Sutisna, Y. (2024). Pariwisata berkelanjutan: Edukasi, partisipasi, dan keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 6(1), 68–77. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21925>
- Gibson, H. J. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. *Sport Management Review*, 1(1), 45–76. [https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(98\)70099-3](https://doi.org/10.1016/S1441-3523(98)70099-3)
- Gunawan, R. B., Supriadi, B., & Risfandini, A. (2024). Strategi pengembangan pariwisata Muslim friendly di Kota Pasuruan. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 98–111. <https://doi.org/10.35931/ak.v4i2.4154>
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Magelang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.22146/jpt.43802>
- Jiang, X., Mastromartino, B., Li, X., & Zhang, J. J. (2025). Value Co-Creation in Participatory Sports Event Tourism: A Mixed Methods Study. *Behavioral Sciences*, 15(3), 1–19. <https://doi.org/10.3390/bs15030368>
- Joyosuharto, R. (2021). *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Berbasis Komunitas*. Pustaka Pariwisata.
- Najib, M., & Surono. (2022). *Analisis Pestel Untuk Mengetahui Hambatan Kunci Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia: Studi Kasus Pada Wisata Danau Toba*. 4(1), 23–46. <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-indonesia-raih-peringkat-pertama>
- Pramono, R., Lemy, D. M., Soemarni, L., Pramezwary, A., & Kristiana, Y. (2019). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 1471–1477. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.340>
- Rangkuti, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara. Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. PT. Gramedia.
- Santoso, E. B., Siswanto, V. K., & Larasati, A. F. (2023). Sustainable Rural Infrastructure Development in Tosari District, Pasuruan Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1186(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1186/1/012006>
- Sapkota, R., Lamichhane, B. R., & Banskota, K. (2024). Local participation in sustainable tourism: A case from Nepal. *Sustainability*, 16(3), 1567. <https://doi.org/10.3390/su16031567>

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D / Sugiyono* (01 ed.). Alfabeta.
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan, pemberdayaan dan perubahan sosial: Pemikiran kritis tentang pembangunan Indonesia*. Refika Aditama.
- Sulistiowati, R., Adisa, A. F., & Caturiani, S. I. (2021). Stakeholder Synergy For Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 3(1), 53–60. <https://doi.org/10.35912/joste.v3i1.1236>
- Wahyudi, I. (2017). *Perencanaan Wilayah Berbasis Pariwisata*. Kencana.
- Wiarti, L. Y., & Putra, N. D. (2021). Tourism-Based Event Performance: a Case Study in Ubud-Bali From Tourist'S Perspective. *Eurasia: Economics & Business*, 7(49), 37–48. <https://doi.org/10.18551/econeurasia.2021-07.03>